

# SKRIPSI

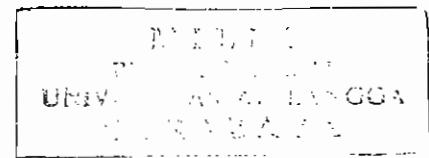
*DIENA ROSMEILASARI*

## PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2000

# PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA



## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink.

Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.  
NIP. 130 604 270

Penyusun,

A handwritten signature in black ink.

Diana Rosmeilasari  
NIM. 039514207

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Pengaji  
Pada tanggal 2 Januari 2000**

**Panitia Pengaji Skripsi :**

**1. Ketua : Sri Handayani, S.H. M.Hum.**



**2. Anggota : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**



**Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



**Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



## BAB IV

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia sebenarnya sudah dapat dilaksanakan di Indonesia sejak disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keppres RI. No. 34 tahun 1981, namun karena pendapat Mahkamah Agung yang berpendapat masih perlunya peraturan pelaksana dari ketentuan ini, maka pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia masih menemui banyak kendala. Setelah dikeluarkannya Perma No.1 tahun 1990, menimbulkan sedikit kelegaan diantara para pencari keadilan khususnya di kalangan investor asing, di mana diharapkan semakin mudah untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, walaupun masih ada kasus-kasus yang menjadi halangan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.
- b. Pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak dapat semuanya di eksekusi di Indonesia, dalam hal ini yang tidak dapat dieksekusi adalah bila putusan arbitrase asing tersebut apabila secara nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, yaitu yang dinamakan ketertiban umum (openbare orde)